

# ■■■ RANGKUMAN MATERI

Sejarah Indonesia — SMK Semua Jurusan

## BAB 3 : DEMOKRASI LIBERAL DAN DEMOKRASI TERPIMPIN (1950–1965)

Slide 1 Pengantar

Slide 2 Dem. Liberal

Slide 3 Dem. Terpimpin

### Pengantar

Setelah pengakuan kedaulatan 1949, Indonesia menghadapi tantangan baru: membangun sistem pemerintahan yang stabil. Periode 1950–1965 ditandai oleh dua sistem demokrasi yang berbeda, yaitu **Demokrasi Liberal (1950–1959)** yang penuh gejolak kabinet, dan **Demokrasi Terpimpin (1959–1965)** yang berpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno.

### ■ Fakta Penting Bab 3

■ Periode	1950 — 1965
■■ Sistem Pertama	Demokrasi Liberal — banyak partai, kabinet tidak stabil
■ Sistem Kedua	Demokrasi Terpimpin — Soekarno pegang kendali penuh
■ Dasar Hukum	UUDS 1950 (Liberal) → kembali ke UUD 1945 (Tepimpin)
■■ Akhir Periode	Pemberontakan G30S/PKI, 30 September 1965

### Perbandingan Dua Sistem Demokrasi

Aspek	Demokrasi Liberal	Demokrasi Terpimpin
Periode	1950–1959	1959–1965
Dasar Hukum	UUDS 1950	UUD 1945 (Dekrit Presiden 5 Juli 1959)
Kekuasaan	Parlemen (DPR)	Presiden Soekarno
Partai	Banyak partai bebas bersaing	Partai dikontrol pemerintah
Kabinet	Sering berganti (7 kabinet)	Kabinet Kerja di bawah Soekarno
Ciri Khas	Pemilu 1955 (paling demokratis)	Nasakom: Nasionalis, Agama, Komunis

## Slide 2 — Demokrasi Liberal (1950–1959)

### Ciri-Ciri Demokrasi Liberal

- Sistem pemerintahan **parlementer** — PM bertanggung jawab kepada parlemen, bukan presiden.
- Partai-partai politik bebas bersaing. Muncul banyak partai: PNI, Masyumi, PKI, NU, PSI, dan lainnya.
- Kabinet sering jatuh karena tidak mendapat dukungan mayoritas parlemen — disebut '**kabinet jatuh bangun**'.
- Menggunakan **UUDS 1950** sebagai landasan konstitusi.
- Diadakan **Pemilu 1955** yang dianggap paling demokratis dalam sejarah Indonesia.

### 7 Kabinet pada Masa Demokrasi Liberal

No.	Nama Kabinet	Periode	PM / Keterangan
1	Natsir	1950–1951	Moh. Natsir (Masyumi) — jatuh karena mosi tidak percaya soal Irian Barat.
2	Sukiman	1951–1952	Sukiman Wirjosandjojo — jatuh karena masalah MSA (bantuan militer AS).
3	Wilopo	1952–1953	Wilopo — jatuh akibat Peristiwa Tanjung Morawa (sengketa tanah).
4	Ali Sastroamidjojo I	1953–1955	Ali Sastroamidjojo — menyelenggarakan KAA 1955 di Bandung.
5	Burhanuddin Harahap	1955–1956	Berhasil menyelenggarakan Pemilu 1955.
6	Ali Sastroamidjojo II	1956–1957	Ali Sastroamidjojo — jatuh akibat konflik internal koalisi.
7	Djuanda	1957–1959	Kabinet Karya — Deklarasi Djuanda (13 Des 1957) tentang batas laut.

### ■■ Pemilu 1955 — Pemilu Paling Demokratis

4 Partai Besar Pemenang	2 Tahap Pelaksanaan
<ul style="list-style-type: none"><li>• PNI (Partai Nasional Indonesia) — 22,3%</li><li>• Masyumi — 20,9%</li><li>• Nahdlatul Ulama (NU) — 18,4%</li><li>• PKI — 16,4%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tahap I (29 Sep 1955): Pemilihan anggota DPR</li><li>• Tahap II (15 Des 1955): Pemilihan anggota Konstituante</li><li>• Konstituante bertugas menyusun UUD baru</li><li>• Konstituante gagal bersidang → Dekrit Presiden 1959</li></ul>

## Slide 3 — Demokrasi Terpimpin (1959–1965)

### Latar Belakang & Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Konstituante hasil Pemilu 1955 gagal menyetujui UUD baru. Ketidakstabilan politik memuncak. Pada **5 Juli 1959**, Presiden Soekarno mengeluarkan **Dekrit Presiden** yang berisi tiga poin penting:

1. Membubarkan Konstituante.
2. Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950.
3. Membentuk MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara).

### Ciri-Ciri Demokrasi Terpimpin

- Kekuasaan terpusat pada Presiden Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi.
- Konsep **NASAKOM** (Nasionalis, Agama, Komunis) dijadikan dasar persatuan politik.
- DPR hasil Pemilu 1955 dibubarkan (1960), diganti **DPR-GR** yang anggotanya dipilih Presiden.
- Kebijakan **Politik Mercusuar** — proyek-proyek besar seperti Monas, Stadion Senayan, Asian Games 1962.
- **Konfrontasi dengan Malaysia** (1963–1966) dan keluar dari PBB (7 Januari 1965).
- Pengaruh **PKI** semakin besar dan dekat dengan Soekarno.

### Kondisi Ekonomi & Pemberontakan

EKONOMI	PEMBERONTAKAN DAERAH
Inflasi melonjak tinggi akibat cetak uang besar-besaran. Proyek-proyek mercusuar menguras kas negara. Rakyat mengalami kesulitan ekonomi parah. Utang luar negeri membengkak.	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PRRI</b> (Pemerintah Revolusioner RI) di Sumatera, 1958</li><li>• <b>Permesta</b> di Sulawesi, 1958</li><li>• <b>DI/TII</b> di berbagai daerah (Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan)</li></ul> Semua pemberontakan berhasil ditumpas TNI.

### ■■ Akhir Demokrasi Terpimpin — G30S/PKI 1965

- ◆ **30 September 1965** — Gerakan 30 September (G30S) meletus. 7 perwira TNI AD diculik dan dibunuh.
- ◆ PKI dituduh sebagai dalang pemberontakan. Soekarno kehilangan dukungan politik.
- ◆ **Supersemar (11 Maret 1966)** — Soekarno menandatangani Surat Perintah Sebelas Maret, mengalihkan kekuasaan kepada Letjen Soeharto.
- ◆ Berakhirlah era Demokrasi Terpimpin dan dimulailah era Orde Baru di bawah Soeharto.

### ■ Nilai yang Dapat Dipetik

- ✓ **Stabilitas politik** adalah kunci pembangunan — tanpa stabilitas, kemajuan bangsa sulit tercapai.
- ✓ **Demokrasi sejati** membutuhkan kedewasaan politik dari seluruh elemen bangsa.
- ✓ **Keseimbangan kekuasaan** penting agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.